

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi Publik

Haryanto, dkk. (2017: 1) menyatakan bahwa, Akuntansi Sektor Publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, Akuntansi Sektor Publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Lebih lanjut Bastian (2014: 2) menyatakan bahwa, Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemendepartemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Biduri (2018: 2) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018: 3) bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik

seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2. Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepolisian.

Selain itu juga, seseorang berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), dan lain-lain. Di bidang pendidikan dan kesehatan, dijumpai beragam organisasi sektor publik, seperti universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai-balai kesehatan, dan yang juga termasuk organisasi sektor publik adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang. Biduri (2018: 3) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Instansi Pemerintah Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

1) Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya:

- (1) Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain; serta
- (2) Lembaga dan badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

2) Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

b. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah.

Contohnya:

- (1) Perguruan tinggi BHMN;
- (2) Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah; dan
- (3) Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

c. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya: (a) Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republik, dan lain-lain; (b) Sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik swasta.

2.1.2. Partisipasi Masyarakat

2.1.2.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2017), partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan solusi alternatif dalam menangani masalah, dan mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Sujarweni (2015: 29) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip *good governance*, dimana masyarakat memiliki hak dan peran secara aktif dalam upaya pengambilan keputusan untuk pelaksanaan sistem pemerintahan.

Menurut Soetrisno (2015) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat didefinisikan menjadi dua macam, yaitu : pertama partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan yang telah dirancang dan ditentukan tujuannya sebagai dukungan kepada pemerintah. Tingkat ukuran dari tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tersebut ditentukan dari banyaknya jumlah masyarakat yang memiliki kemauan untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap pembiayaan baik secara materi maupun tenaga mereka. Kedua partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai sebagai bentuk kerjasama erat antara kegiatan perencanaan dengan rakyat. Dalam pengertian ini, tingkat ukuran dari tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tersebut tidak hanya diukur melalui kemauan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap pembiayaan pembangunan saja, namun ada tidaknya hak yang mereka miliki untuk ikut serta menentukan tujuan

dan arah dari proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di sekitar wilayah tempat mereka tinggal.

2.1.2.2. Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat

Menurut Holil (2010:23), terdapat empat faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Iklim sosial, politik, ekonomi, budaya dalam pergaulan, keluarga, permainan, sekolah, masyarakat dan bangsa yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dari masyarakat.
2. Kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi. Nilai-nilai, norma-norma, struktur sosial dan keadaan lingkungan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dari masyarakat.
3. Komunikasi antar sesama warga masyarakat yang intensif. Komunikasi masyarakat dengan para pemimpinnya dan sistem sosial yang berlaku didalam masyarakat dengan sistem yang diluar masyarakat.
4. Kebebasan masyarakat untuk berkreasi dan berprakarsa. Lingkungan sosial, budaya dan politik dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya gagasan, prakarsa dari seseorang atau kelompok.

2.1.2.3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Huraerah (2018:35) mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi harta benda adalah bentuk partisipasi masyarakat dengan memberikan bantuan uang, makanan, dan lain-lain dalam proses kegiatan pembangunan.

2. Partisipasi tenaga adalah bentuk partisipasi dengan memberikan tenaganya dalam proses kegiatan pembangunan.
3. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran adalah partisipasi masyarakat dalam mendorong terwujudnya aneka ragam industri atau usaha.
4. Partisipasi sosial adalah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keguyuban di kehidupan bermasyarakat.

Menurut Cohen dan Uphoff (2017:65) mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Partisipasi dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan memilih keputusan alternatif mengenai ide/gagasan tentang kepentingan bersama dalam memastikan arah pembangunan dan orientasi yang harus dilakukan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat dapat ikut serta berkontribusi untuk menjalankan program, meliputi : kegiatan administrasi, dana, koordinasi, menjabarkan program dan menggerakkan sumber daya.
3. Partisipasi dalam mengambil manfaat. Partisipasi ini berhubungan dengan hasil dari ketercapaian/keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan baik dari *quantity* ataupun *quality*. Segi kuantitas menyangkut tingkat presentase dari keberhasilan program, sedangkan segi kualitas menyangkut perubahan dari output.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan keseluruhan program yang telah disesuaikan dengan

perencanaan yang dibuat dan terhindar dari penyalahgunaan/penyimpangan.

2.1.2.4. Tingkatan dalam Partisipasi Masyarakat

Dalam kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi delapan komponen (Adiyoso, 2012:76), yaitu :

1. Citizen Control

Pada tingkat ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat mempunyai hak yang kuat untuk menentukan program apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan kepentingan mereka.

2. Delegated Power

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kewenangan untuk membuat suatu keputusan atas rencana tertentu, sehingga kemungkinan masyarakat dapat mengendalikan keputusan pemerintah.

3. Partnership

Pada tingkat ini masyarakat mempunyai hak untuk berdiskusi dengan pemerintah. Tujuannya diskusi adalah mengambil kesepakatan untuk membagi tanggung jawab dalam proses perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta memecahkan permasalahan yang ada.

4. Placation

Pemerintah akan memilih sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota dari badan publik, dimana orang tersebut

mempunyai akses tertentu dalam mengambil sebuah keputusan. Usulan masyarakat tetap diperhatikan, namun dikarenakan jumlahnya lebih sedikit daripada anggota dari pemerintah maka tidak menjamin mampu mengambil keputusan.

5. Consultation

Masyarakat diundang untuk membagikan pendapat mereka, meskipun pendapat mereka belum tentu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan.

6. Informing

Pemerintah akan memberikan informasi kepada masyarakat hanya mengenai proposal kegiatan dan masyarakat tidak dapat mempengaruhi hasilnya. Informasi tersebut akan diberikan saat tahap akhir perencanaan dan masyarakat hanya mempunyai hak yang kecil untuk mempengaruhi rencana yang telah direncanakan/disusun.

7. Therapy

Pemerintah menjelaskan mengenai alasan proposal dengan seolah-olah melibatkan masyarakat didalamnya. Tujuan tahap ini adalah ingin mengubah pola pikir dari masyarakat bukan untuk mendapatkan saran dari masyarakat.

8. Manipulation

Tingkat ini adalah tingkat terendah karena tahap ini hanya untuk mendapatkan dukungan dari publik dan memberikan janji tentang keadaan lebih baik yang tidak akan pernah terealisasikan atau terjadi.

2.1.2.5. Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Heller, *et al.* dalam Sujarweni (2015:32) partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 indikator, yaitu :

1. Pengambilan keputusan dengan indikator : keterlibatan dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh desa.
2. Penyusunan anggaran dengan indikator : memberikan usulan atau saran terhadap perencanaan anggaran dana desa dan keterlibatan aktif masyarakat dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.
3. Pelaksanaan anggaran dengan indikator : keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan anggaran desa, memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran desa, dan memberikan penghargaan.

2.1.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut McClelland dalam Sudarmanto (2015:76), kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut Rivai (2009:45) kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki atau dicapai seseorang, yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga bisa menjalankan penampilan kognisi, afeksi dan perilaku psikomotorik tertentu.

Pengertian kompetensi menurut Wibowo (2014) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan individu yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan. Menurut Yusuf (2015) sumber daya manusia didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian startegi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau potensi, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang dimiliki.

2.1.3.2 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Michael dalam Wibowo (2014), terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu:

1. Keyakinan dan Nilai

Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir kedepan.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran dikebanyakan kompetensi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.

4. Karakteristik Kepribadian

Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Apabila manajer dapat mendorong motivasi pribadi seorang pekerja, kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, mereka akan sering menemukan peningkatan penguasaan dalam sejumlah kompetensi yang memengaruhi kinerja.

6. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis.

8. Budaya Organisasi

Budaya organisasi memengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa diantara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi.
- b. Sistem penghargaan mengomunikasikan para pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
- c. Praktik pengambilan keputusan memengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- d. Filosofi organisasi, visi misi, dan nilai-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
- e. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.

- f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan.
- g. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung memengaruhi kompetensi kepemimpinan.

2.1.3.3 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Thoha (2018) terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentukan kompetensi SDM. Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan cara yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang atau pendidikan yang telah ditempuh. Pengetahuan yang dimiliki seseorang turut meningkatkan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Kemampuan (*skill*)

Merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.

3. Sikap (*attitude*)

Merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai sesuai dengan peraturan karyawan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.1.3.4. Indikator kompetensi

Menurut Thoha (2018) indikator kompetensi sumber daya manusia menurut yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Memiliki pengetahuan yang mendukung pekerjaan, memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan.

2. Kemampuan (*skill*)

Memiliki keahlian teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani, memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, memiliki kemampuan mencari solusi atas permasalahan yang di hadapi.

3. Sikap (*attitude*)

Memiliki inisiatif dalam membantu rekan kerja, memiliki keramahan dan kesopanan dalam melaksanakan pekerjaan dan serius menangani setiap keluhan-keluhan pasien.

2.1.4. Pengawasan

2.1.4.1. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (2013) pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung

mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan menurut Viktor dalam Makmur (2011) adalah setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal dan efisien, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Dalam konteks membangun manajemen Pemerintahan publik dengan prinsip *Good Governance* (tata kelola Pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga fungsi Pemerintahan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dalam penggunaan *Good Governance* itu sendiri.

Sujanto (2016) mengemukakan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian pengawasan juga merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Safri (2014) mengemukakan bahwa pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Murdick dalam Agustinus (2012:101)

berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial sangat diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasar menurutnya terdiri dari tiga tahap :

1. Menetapkan standar pelaksanaan
2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar
3. Menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.

Sedang Ukas (2014) menyebutkan ada tiga fase pengawasan yaitu :

1. Pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta meminimalisir sedini mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.
2. Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan.
3. Pengawasan akhir merupakan hasil kombinasi dari pengawasan awal dan tengah

Menurut Nawawi (2015) kategori pengawasan dapat dibedakan menjadi jenis, metode dan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai berikut :

Berdasarkan jenisnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer pada suatu unit kerja organisasi atau unit kerja pada masing-masing bidang pekerjaan.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga kerja di luar dari organisasi yang diawasi pada saat menjalankan tugas utamanya.

Berdasarkan metode, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penilaian laporan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pengawasan ini dilaksanakan dengan hanya menggunakan dokumen-dokumen hasil pekerjaan atau laporan yang sudah ada.

b. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Pengawasan langsung ini bisa digabungkan dengan cara mengawasi secara langsung untuk mencari data dan menilai melalui dokumen hasil pekerjaan.

Berdasarkan pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut

: a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah suatu cara untuk mengamati, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dari suatu

organisasi kerja dengan seluruh komponen fungsi yang melaksanakan di suatu organisasi nirlaba.

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah suatu cara mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang memiliki fungsi dan tugas utama dibidang pengawasan.

c. Pengawasan masyarakat'

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan adanya pertanyaan, aduan, keluhan dan saran yang disampaikan langsung oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan oleh organisasi nirlaba yang tugas utamanya yaitu melaksanakan pelayanan publik di bidang pemerintahan. Sementara Bohari dalam Agustinus (2012) membagi dua macam teknik pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilaksanakan, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan preventif ini bertujuan:

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- b. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
- c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.

- d. Menentukan kewenangan dan tanggungjawab sebagai sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan Represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dan membandingkan dengan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan represif ini bisa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap dokumen pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi.

2.1.3.2. Indikator Pengawasan

Adapun indikator pengawasan menurut Robins dan Coulter (2015:460) yaitu:

- a. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

- b. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
- c. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
- d. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi

2.1.5. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.5.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah disetujui secara periodik (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Ulum (2015) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang memiliki kepercayaan oleh masyarakat yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan tugasnya.

Menurut Yusuf (2015:56) akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi,

dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik.

Menurut Adisasmita (2011) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012) akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas seperti yang diungkapkan oleh Krina (2003) dinyatakan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan atas aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja seseorang atau pimpinan pada unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang diberi pertanggungjawaban. Semakin baik suatu sistem akuntansi yang memberikan informasi yang handal, akurat, pertanggungjawaban, dan tepat waktu maka akuntabilitasnya akan semakin baik (Lestari, 2014).

Pada pemerintah desa, akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan yang

berkenaan dengan pembangunan pemerintahan desa (Sukasanto, dalam Sumpeno, 2011). Suatu organisasi dapat disebut memiliki manajemen yang akuntabel apabila dalam kegiatannya terpenuhi syarat: (1) penentuan tujuan yang tepat, (2) pengembangan standar sesuai kebutuhan dalam mencapai tujuan, (3) melakukan promosi penerapan pemakaian standar secara efektif, (4) pengembangan standar organisasi dan operasi secara efisien dan ekonomis (Husna, 2016). Tingkat akuntabilitas dana desa memberi wadah kepada masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam menyelenggarakan pengawasan pembangunan, sehingga proses pembangunan berpotensi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Naimah, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mempertanggungjawabkan.

2.1.5.2 Indikator Akuntabilitas Laporan Dana Desa

Didalam sebuah lembaga, terutama didalam lembaga publik harus memiliki laporan administrasi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam suatu lembaga hal seperti itu sering disebut dengan akuntabilitas. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran akuntabilitas laporan dana desa yakni:

**Tahap Perencanaan
Indikator**

1. Pemerintah desa harus mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa
2. Dalam mekanisme usulan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa harus ditampung oleh pemerintahan desa
3. Di dalam perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa harus mengkoordinil segala masukan dari peserta musrembang

**Tahap Pelaksanaan
Indikator**

1. Pemerintahan desa harus secara jelas dalam mendukung keterbukaan kepada masyarakat desa dalam proses pelaksanaan yang didanai oleh alokasi dana desa
2. Dalam pelaksanaan alokasi dana desa pemerintah desa harus melakukan prinsip transparansi
3. Dalam tahap pelaksanaan alokasi dana desa pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas

**Tahap Pertanggungjawaban
Indikator**

1. Pemerintah desa harus membuat pelaporan untuk tahap pertanggungjawaban atas alokasi dana desa
2. Pada tahap pertanggungjawaban harus ada nya evaluasi untuk terjadi transparansi oleh pemerintahan desa
3. Dalam pelaporan pemerintah desa harus mematuhi struktur yang telah di

tentukan oleh pemerintah kabupaten untuk tahap pertanggungjawaban

Tahap Pengawasan Indikator

1. Di dalam pendamping pengelolaan alokasi dana desa harus memastikan tidak ada kesalahan terhadap tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan di tahap pertanggungjawaban
2. Dalam pengawasan harus ada bimbingan sehingga kegiatan alokasi dana desa berjalan sesuai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.1.5.3. Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas publik sendiri dibagi menjadi dua macam (Mahsun, dkk,2013), adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) merupakan proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas.

2.1.5.4. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2012) organisasi sektor publik harus dapat memenuhi syarat dari empat dimensi akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, meliputi :

1. Akuntabilitas proses merupakan prosedur untuk menjalankan tugas yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, prosedur administrasi dan sistem informasi manajemen. Akuntabilitas proses dilakukan oleh organisasi sektor publik dengan memberikan pelayanan responsif dan biaya murah kepada publik.
2. Akuntabilitas program merupakan program yang memiliki tujuan untuk mendukung terlaksananya strategi demi mencapai visi, misi dan tujuan dari organisasi. Organisasi sektor publik juga harus memberikan pertanggungjawaban atas program yang telah direncanakan dan dilaksanakan.
3. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum merupakan konsep akuntabilitas yang memiliki hubungan terhadap kepatuhan kepada hukum serta peraturan dan kejujuran dalam menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan penyalahgunaan jabatan.
4. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pemerintah yang ada di pusat ataupun daerah terhadap kebijakankebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat lainnya.
- 5.

2.1.6. Hubungan Antar Variabel

2.1.6.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018). Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Aulia *et al*, 2018).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran. Partisipasi masyarakat yang berjalan dengan efektif dan efisien maka akuntabilitas

pengelolaan alokasi dana desanya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan pembangunan desa (Sugista, 2017).

Penelitian Periansya & Sopiyan AR, (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian Umaira & Adnan, (2019), Aulia *et al*, (2018), Jannah *et al.*, (2018), Perdana, (2018), Mada *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Masyarakat yang diberikan pelayanan, seharusnya harus ikut serta dalam menyelenggarakan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi yang dilakukan masyarakat maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya.

2.1.6.2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Aparatur desa merupakan kemampuan terpadu dari pemikiran dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh setiap individu (Hasibuan, 2013). Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010). Aparatur harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis dan integritas. Kompetensi

aparatur desa mencakup kapasitas terkait kemampuan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuannya.

Kompetensi aparatur desa merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi yang ada dengan cara *bonding cost*. Jika perangkat desa itu paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Hasil penelitian Periansya & Sopiyan AR, (2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung penelitian Umaira & Adnan, (2019), Sapartiningsih, dkk (2018), menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian dari Ismail et al., (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Aparatur desa yang kompeten dapat lebih bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas dan tugas. Kualitas sumber daya manusia yang semakin kompeten, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.1.6.3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi untuk memastikan supaya seluruh tugas yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (Siagian, 2012). Tercapainya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat diketahui melalui pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sehingga setiap proses dalam mengelola dana desa sangat dibutuhkan pengawasan agar pengelolaan terlaksana secara efektif dan terhindar dari penyimpangan. Oleh karena itu, pengawasan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Kurnadi tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Jurnal penelitian Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh MADA tahun 2014 dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah

Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal penelitian Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2). Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai koefisien determinasi adalah 0,751. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 75,10%. Sedangkan sisanya sebesar 24,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Julianto tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda

dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, variabel penggunaan sistem keuangan desa (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, variabel kompetensi pendamping desa (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, serta variabel komitmen pemerintah daerah (X4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhami, Mutimatun. 2019. Dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa (Study Kasus di Desa Se Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada perangkat desa. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.

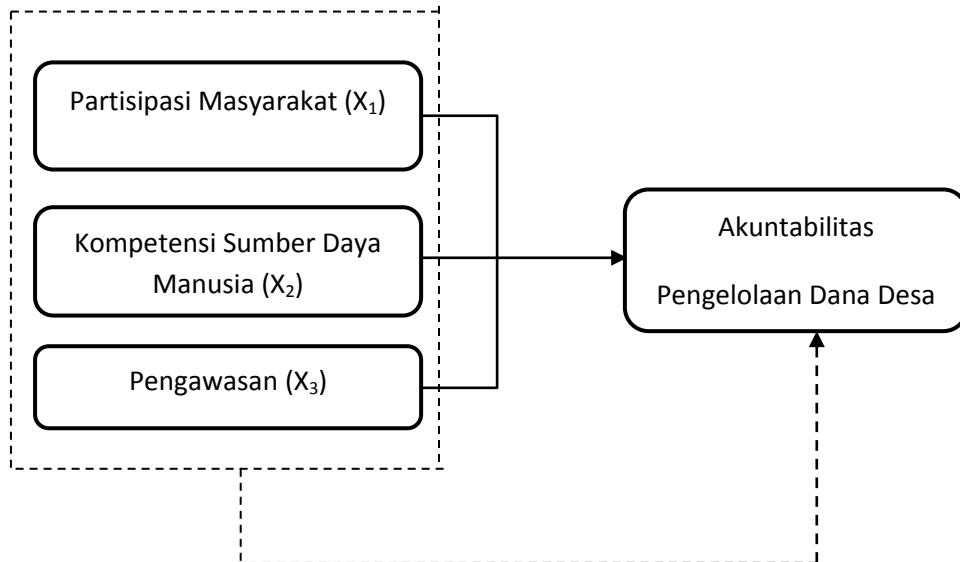
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Hal ini berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel kompetensi sumber daya manusia berada dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berada dalam kategori tinggi, sehingga berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel komitmen organisasi berada dalam

kategori tinggi sedangkan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan dana desa, hal ini berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel yang menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berada dalam kategori sangat tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhrayani tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Tesis Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (4) Kompetensi aparat desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

- ▶ : Pengaruh secara parsial
- - - - -▶ : Pengaruh secara simultan

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah di duga ada pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim).